

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti untuk melakukan penelitian ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan & Persamaan
1	Pengaruh Kualitas SDM, Ukuran Usaha Dan Lama Usaha Terhadap Pemahaman Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM (Studi Kasus Pada Umkm Di Kota Metro) (Andayani et al., 2021)	Variabel Dependen: Pemahaman Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Variabel Independen: 1.Kualitas Sumber Daya Manusia 2.Ukuran Usaha 3.Lama Usaha	1. Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM 2. Ukuran Usaha dan lama usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM	Perbedaan: Terletak pada variabel Sosialisasi SAK EMKM, tingkat pendidikan dan lokasi penelitian Persamaan : Penggunaan variabel pemahaman terhadap SAK EMKM, ukuran usaha/skala usaha, lama usaha/umur usaha.

2.	Pengaruh Kualitas SDM, Ukuran Usaha, Dan Lama Usaha Terhadap Pemahaman UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM (Sholeh et al., 2020)	Variabel Dependen: Pemahaman terhadap SAK EMKM Variabel Independen: Variabel Independen: 1. Kualitas SDM 2. Ukuran Usaha 3. Lama Usaha	1. Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia, Ukuran usaha, dan lama usaha. Mempunyai pengaruh positif yang signifikan pada pemahaman UMKM dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM	Perbedaan: Terletak pada variabel sosialisasi SAK EMKM, tingkat pendidikan dan lokasi penelitian Persamaan : Penggunaan variabel pemahaman terhadap SAK EMKM, ukuran usaha/skala usaha, lama usaha/umur usaha.
3.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi pemahaman UMKM Dalam Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Pada UMKM Di Kelurahan Jakasetia (Rejeki & Kautsar, 2020)	Variabel Dependen: Pemahaman SAK EMKM Variabel Independen: 1. Pemberian informasi dan sosialisasi 2. Latar belakang pendidikan 3. Jenjang pendidikan 4. Lama usaha 5. Ukuran usaha	1. Pemberian Informasi dan sosialisasi, latar belakang, jenjang pendidikan, lama usaha, dan ukuran usaha berpengaruh signifikan positif terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.	Perbedaan: Terletak pada lokasi penelitian, tidak menggunakan latar belakang pendidikan. Persamaan: Sama-sama menggunakan variabel dependen pemahaman SAK EMKM. Serta menggunakan variabel independen jenjang pendidikan, lama usaha, ukuran usaha.

4.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Di Kecamatan Sanga Desa (Mardiana et al., 2021)	Variabel Dependen: Pengaruh Pemahaman UMKM terhadap penyusunan laporan keuangan Berdasarkan SAK EMKM Variabel Independen: 1. Pemberian Informasi dan sosialisasi 2. Latar belakang pendidikan pemilik 3. Jenjang pendidikan 4. Lama usaha 5. Skala/ukuran usaha	1. Pemberian informasi dan sosialisasi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pemahaman UMKM terhadap SAK EMKM. 2. Latar belakang pendidikan pemilik, jenjang pendidikan, lama usaha, skala/ukuran usaha tidak mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pemahaman UMKM terhadap SAK EMKM.	Perbedaan: Terletak pada lokasi penelitian, tidak menggunakan latar belakang pendidikan. Persamaan: Sama-sama menggunakan variabel Pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Dan variabel independen jenjang pendidikan, lama usaha/umur, skala/ukuran usaha.
----	---	---	--	--

5.	Factors Affecting Understandibility Of Micro, Small, and Medium Enterprises In Preparation Of Financial Statement Based On SAK ETAP In Palembang (Budiman et al., 2017)	Variabel Dependen: Pemahaman Mikro Kecil dan Menengah Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Variabel Independen: 1. Pemberian Informasi dan sosialisasi 2. Latar belakang pendidikan 3. Ukuran usaha 4. Efek jangka panjang.	1. Pemberian Informasi dan sosialisasi, latar belakang pendidikan, ukuran usaha tidak berpengaruh positif terhadap pemahaman UMKM menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Efek jangka panjang berpengaruh positif terhadap pemahaman UMKM dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.	Perbedaan: Penelitian ini menggunakan variabel dependen pemahaman UMKM terhadap SAK EMKM. Serta menggunakan variabel umur usaha. Persamaan: Sama-sama menggunakan variabel independen ukuran usaha/skala
----	---	---	---	--

6.	Analysis Of The Factors Affecting Undersading Of Small And Medium Businesses In Preparing Financial Reports (Wibowo et al., 2018)	Variabel Dependen: 1. Pemahaman Usaha Kecil dan Menengah Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Variabel Independen: 1. Informasi dan Sosialisasi 2. Ukuran Usaha 3. Presepsi Pemilik	1. Informasi dan Sosialisasi serta Ukuran Usaha berpengaruh positif terhadap pemahaman usaha kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP 2. Presepsi pemilik tidak berpengaruh positif terhadap pemahaman usaha kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP	Perbedaan: Penggunaan variabel dependen yaitu Pemahaman SAK EMKM. Persamaan: Menggunakan variabel independen Ukuran usaha
----	---	---	---	---

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa niat berperilaku (*behavioral intention*) tidak hanya dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*) dan norma subjektif (*subjective norm*), namun dipengaruhi juga oleh kontrol berperilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Kontrol berperilaku yang dirasakan dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan perkiraan dari seseorang tentang sulit atau tidaknya untuk melakukan suatu

perilaku tertentu (Azwar, 2003).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, niat merupakan fungsi dari tiga determinan pertama yang bersifat personal, kedua merefleksikan pengaruh social dan ketiga berhubungan dengan masalah kontrol (Ajzen, 2005). Berikut ini adalah penjabaran dari variabel utama *Theory of Planned Behavior* antara lain :

a. Niat (Intention)

Niat merupakan komponen yang ada di dalam diri individu yang mengacu pada keinginan untuk melakukan tingkah laku tertentu. Niat memiliki peran yang khas dalam mengarahkan tindakan, yaitu menjadi penghubung diantara pertimbangan mendalam yang diyakini dan diinginkan oleh seseorang dengan tindakan tertentu. Menurut *Theory of Planned Behavior*, seseorang dapat bertindak berdasarkan niatnya hanya apabila seseorang tersebut mempunyai control terhadap perilakunya (Ajzen, 2005). Teori ini tidak hanya menekankan pada rasionalitas dari tingkah laku manusia saja, akan tetapi teori ini juga menekankan pada keyakinan bahwa target tingkah laku berada dibawah kontrol kesadaran individu tersebut.

b. Sikap Seseorang Terhadap Perilaku (*Attitude Towards Behavior*)

Teori ini memberikan penjelasan bahwa sikap individu terhadap suatu perilaku didapatkan dari keyakinan terhadap konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh perilaku tersebut, yang disebut dengan *behavior beliefs* (keyakinan terhadap perilaku). Berdasarkan *Theory*

of Planned Behavior, seseorang yang percaya bahwa menunjukkan suatu perilaku tertentu akan mengarahkan pada hasil positif yang akan mempunyai sikap *favorable* terhadap perilaku yang ditampilkan, sedangkan orang yang percaya bahwa menampilkan tingkah laku tertentu akan mengarahkan pada hasil yang negative, maka ia akan memiliki sikap *unfavorable* (Ajzen, 2005). Secara umum sikap seseorang terhadap perilaku berkaitan dengan sikap dasar seorang (*person in nature*) yang berpengaruh pada *intense* berperilaku dan berhubungan dengan norma subjektif dan *perceived behavioral control*.

c. Norma Subjektif (*Subjective Norm*)

Subjective Norms merupakan faktor dari luar individu yang berisi mengenai persepsi seseorang tentang apakah orang lain akan menyetujui atau tidak menyetujui suatu tingkah laku yang ditampilkan (Baroon & Donn, 2000). Norma subjektif ditentukan oleh adanya keyakinan normative (*normative belief*) dan keinginan untuk mengikuti (*motivation to comply*) (Ajzen, 2005). Dalam *Theory of Planned Behavior*, norma subjektif juga identik dengan keyakinan dari seseorang mengenai reaksi atau pendapat dari orang lain atau kelompok lain tentang apakah individu perlu, harus atau tidak boleh melakukan suatu perilaku, dan memotivasi individu untuk mengikuti pendapat orang lain tersebut (Michener dkk, 2004).

d. Persepsi Mengenai Control Perilaku (*Perceived Behavioral Control*)

Presepsi Mengenai Control Perilaku (*Perceived Behavioral Control*) memberikan gambaran mengenai kemampuan diri seseorang dalam melakukan suatu perilaku. Hal ini juga dikemukakan oleh Ismail & Zain (2008), yaitu presepsi mengenai kontrol yang dimiliki perilaku merupakan presepsi individu mengenai kontrol yang dimiliki individu tersebut sehubungan dengan tingkah laku tertentu. Presepsi mengenai kontrol perilaku ditentukan dari pengalaman masa lalu seseorang dan juga dari perkiraan seseorang mengenai seberapa sulit dan mudahnya untuk melakukan suatu perilaku. Presepsi mengenai control perilaku ditentukan oleh dua faktor yaitu *control beliefs* (kepercayaan mengenai kemampuan dalam mengendalikan) dan *perceived power* (presepsi mengenai kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu perilaku).

Theory of Planned Behavior mempelajari tentang sikap terhadap perilaku. Penentu terpenting dalam perilaku seseorang adalah niat untuk berperilaku, yaitu kombinasi dari sikap untuk menampilkan perilaku tersebut dan norma subjektif. Seseorang akan menampilkan suatu perilaku yang positif atau negatif untuk menunjukkan suatu perilaku tertentu sehingga memunculkan niat untuk berperilaku yang kemudian ditentukan oleh sikap. Selain itu juga ada faktor dari luar individu yang berisi presepsi dan keyakinan seseorang untuk menerima atau tidak tindakan yang akan dilakukannya. Jika seseorang meyakini apa yang menjadi norma kelompok, maka

seseorang tersebut akan mematuhi dan membentuk perilaku yang sesuai dengan kelompoknya. Teori ini juga menjelaskan kemampuan diri seseorang dalam melakukan suatu perilaku dari pengalaman masa lalu seseorang tersebut dan juga perkiraan seseorang mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan suatu perilaku yang bisa didapatkan informasinya dari orang lain juga (Nugroho, 2017)

Dewan Standar Akuntansi (DSAK) menyusun SAK EMKM dengan tujuan untuk mendorong dan memfasilitasi UMKM dalam kebutuhan melakukan pelaporan keuangan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016). Didukung dengan adanya sosialisasi dan juga pelatihan dari pihak yang terkait dalam hal ini dapat membantu mendorong UMKM untuk menerapkan SAK EMKM dalam melakukan penyusunan laporan keuangan usahanya. Kemudahan yang diberikan pada SAK EMKM dapat menimbulkan kepercayaan positif sehingga UMKM akan merasa termotivasi dan dapat menimbulkan persepsi mengenai betapa mudahnya untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM (Purwaningsih, 2018)

Hubungan antara *Theory of Planned Behavior* dengan penelitian ini yaitu apabila didalam diri para UMKM sudah timbul niat untuk memahami SAK EMKM maka dapat melakukan pembukuan dalam usahanya berdasarkan SAK EMKM. Dimana niat ini bisa timbul karena adanya pemberian sosialisasi mengenai manfaat yang akan

didapatkan oleh UMKM apabila melakukan pembukuan. Apabila niat sudah timbul pada para pelaku UMKM kemudian akan ada determinan sikap seseorang terhadap perilaku maka seseorang tersebut akan memiliki keyakinan untuk melakukan pembukuan. Dimana keyakinan tersebut berkaitan dengan norma subjektif yang terdapat pada keyakinan seseorang untuk menyetujui atau tidak untuk melakukan pemahaman pembukuan sesuai dengan SAK EMKM. Bukan hanya itu jika UMKM memiliki pengetahuan mengenai akuntansi pada masa lalu yang didapatkannya melalui pendidikan seperti yang dijelaskan pada salah satu determinan teori ini yaitu persepsi mengenai kontrol perilaku. Dimana kejadian dimasa lalu dan persepsi mengenai kemudahan dalam menyusun laporan keuangan akan meningkatkan pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

2.2.2 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

a. Definisi UMKM

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU RI bab 1 pasal 1 Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah memberikan definisi sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha menurut Undang-Undang tersebut adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha mikro

merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu juga, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah.

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, 2008*)

b. Kriteria UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, kriteria UMKM dapat dibagi berdasarkan jumlah asset dan omsetnya, sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk bangunan tempat usaha atau tanah; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Badan Pusat Statistik, UMKM memiliki jumlah tenaga kerja, dengan rincian kategori sebagai berikut : usaha rumah tangga dan mikro memiliki 1-4 tenaga kerja, usaha kecil memiliki 5-19 tenaga kerja ,usaha menengah memiliki 20-99 tenaga kerja, dan usaha besar memiliki tenaga kerja sebanyak 100 tenaga kerja atau lebih (Ningtiyas, 2017)

2.2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Indonesia (DSAK IAI) sebagai penyusun standar akuntansi keuangan yang di akui indonesia, menyadari bahwa pentingnya peran Usaha Mikro Keci Menengah (UMKM) dalam perkembangan perekonomian bangsa. Oleh karena itu, pada tahun 2009 DSAK IAI menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai bentuk dukungan untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan UMKM di Indonesia (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016)

Seiring perkembangan, adanya kebutuhan terkait ketersediaan standar akuntansi yang lebih sederhana dari SAK umum berbasis IFRS dan SAK ETAP yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dalam menghasilkan laporan keuangan menggunakan kedua pilar SAK tersebut. Oleh karena itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Indonesia (DSAK IAI) mengembangkan standar akuntansi yang dapat untuk memenuhi kebutuhan UMKM dengan membentuk kelompok kerja yang melibatkan asosiasi, regulator, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menghadirkan SAK yang dapat mendukung kemajuan UMKM di Indonesia. Hingga pada tahun 2016, DSAK IAI mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana dengan ETAP dan definisi dan karakteristik dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM yang lebih sederhana karena dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis. SAK EMKM efektif per tanggal 1 Januari 2018 sehingga mulai tahun 2018 UMKM dapat menyusun laporan keuangannya dengan menggunakan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha

entitas tersebut, dan antara suatu usaha/entitas dengan usaha/entitas lainnya. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016).

SAK EMKM memuat pengaturan akuntansi yang lebih sederhana dari pada SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis. Guna untuk UMKM mencatat asset dan liabilitas sebagai biaya perolehannya.

Berdasarkan SAK EMKM (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016) laporan keuangan EMKM disusun berdasarkan asumsi akrual. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia memutuskan menggunakan asumsi dasar akrual karena konsisten dengan kerangka konseptual laporan keuangan serta asumsi tersebut konsisten dengan asumsi dasar yang digunakan di standar akuntansi keuangan lainnya. Laporan keuangan yang menggunakan basis akrual juga menghasilkan informasi keuangan yang lebih menggambarkan secara tepat sesuai dengan kondisi dan aktivitas usaha pada periode tertentu.

Basis akrual (*accrual basis*) adalah teknik pencatatan yang mengakui terjadinya transaksi meskipun penerimaan kas serta pengeluaran kas belum terjadi atau kas diterima dan dikeluarkan di masa depan. Laporan keuangan yang mengadopsi teknik basis akrual mengakui adanya utang dan piutang. Dalam basis akrual, akun-akun diakui sebagai asset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing akun-

akun tersebut.

Menurut (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016) dalam SAK EMKM, laporan keuangan entitas minimal terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
2. Laporan laba rugi selama periode
3. Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan.

2.2.4 Tujuan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Tujuan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM menurut (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016) adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh semua pihak yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Tujuan Umum dari laporan keuangan adalah untuk memberi informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber daya ekonomi dari kewajiban dari perusahaan bisnis agar dapat:

1. Mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya;
2. Mengajukan pendanaan dan investasinya;

3. Mengevaluasi kemampuan dalam memenuhi komitmen.

SAK EMKM ini dibuat sederhana agar menjadi Standar Akuntansi Keuangan yang mudah dipahami oleh sekitar 57,9 juta pelaku UMKM (Rahmawati, 2018). Kerangka pelaporan keuangan SAK EMKM disusun dengan harapan dapat membantu entitas dalam melakukan transisi dari pelaporan keuangan yang berdasar kas ke pelaporan keuangan dengan dasar akrual. Penerbitan SAK EMKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia sehingga memperoleh akses yang semakin luas untuk pembiayaan dari industri perbankan. Kedepannya, SAK EMKM ini juga diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan dan pengembangan pedoman atau panduan akuntanasi bagi UMKM yang bergerak diberbagai bidang usaha.

2.2.5 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Menurut (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016) dalam SAK EMKM, laporan keuangan entitas disusun menggunakan asumsi dasar akrual dan keberlangsungan usaha, sebagaimana yang digunakan oleh entitas selain entitas mikro, kecil ataupun menengah serta menggunakan konsep entitas bisnis. Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir periode pelaporan.

Berdasarkan SAK EMKM laporan keuangan yang dibuat yaitu terdiri laporan posisi keuangan yang dibuat menunjukkan posisi keuangan di akhir periode; laporan laba rugi digunakan untuk

melaporkan kinerja entitas selama periode; dan catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan rincian pos-pos yang relevan. Laporan keuangan entitas terdiri dari :

1. Laporan Posisi Keuangan

Menurut (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016) Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang asset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan atau disebut dengan neraca.

Sederhananya, laporan posisi keuangan memberikan gambaran menyeluruh tentang informasi keuangan UMKM atau instansi. Dimana informasi tersebut termasuk mengenai sumber daya ekonomi yang dimiliki UMKM, utang-utang dan sumber pembiayaan (modal) untuk mendapatkan sumber daya ekonomi tersebut.

Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut:

a) Aset

Sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomik dimasa depan diharapkan akan di peroleh oleh entitas. Asset bisnis seperti asset lancar, asset tidak lancar, dan tidak berwujud.

b) Liabilitas

Kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa di masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari

sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Pada posisi liabilitas terdapat akun kewajiban seperti utang usaha dan utang bank.

c) Ekuitas

Hak residual atas asset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Ekuitas seperti modal saham dan laba ditahan.

Laporan posisi keuangan entitas menurut SAK EMM dapat mencakup akun-akun yaitu:

1. Kas dan setara kas;
2. Piutang;
3. Persediaan;
4. Aset tetap;
5. Utang usaha;
6. Utang bank;
7. Ekuitas

2. Laporan Laba Rugi

Menurut (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016) laporan laba rugi memasukkan seluruh penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali SAK EMKM mensyaratkan lain. SAK EMKM mengatur perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan.

Entitas dapat menyajikan laporan laba rugi yang merupakan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode. Dalam laporan laba rugi entitas dapat mencakup pos-pos akun sebagai berikut:

1. Pendapatan;
2. Beban keuangan;
3. Beban pajak.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi tambahan dari rincian akun-akun tertentu yang relevan. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Dimana setiap akun dalam laporan keuangan menunjukkan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memuat:

- a) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SAK EMKM
- b) Ikhtisar kebijakan akuntansi
- c) Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

2.2.6 Pemahaman UMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti kata paham memiliki makna pandai atau mengerti benar sedangkan pemahaman adalah

proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang mempunyai pemahaman standar akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang standar akuntansi.

Pemahaman sendiri dapat dibedakan kedalam tiga kategori. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, dan pemahaman tingkat ketiga atau tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Sehingga, pemahaman akuntansi berarti kemampuan untuk mengukur mengkasifikasikan (membedakan) dan mengikhtisarkan (menyajikan) unsur-unsur laporan keuangan SAK EMKM adalah suatu standar akuntansi yang digunakan bagi entitas mikro, kecil dan menengah yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Maka pemahaman SAK EMKM merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengukur, mengklasifikasi (membedakan), dan mengikhtisarkan penyajian unsur-unsur laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam SAK EMKM.

2.2.7 Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Laporan Keuangan

2.2.7.1 Tingkat Pendidikan

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjelaskan bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Menurut (Mardiana et al., 2021) menyatakan bahwa tingkat pendidikan merupakan tingkat pendidikan formal. Tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi penting bagi kesiapan untuk menghadapi tantangan secara global. Tingkat pendidikan yang telah ditempuh dan dimiliki seseorang pada dasarnya dapat memengaruhi kinerja usaha yang baik.

(Rejeki & Kautsar, 2020) menjelaskan bahwa tingkat atau jenjang pendidikan yaitu tahapan didalam pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan dari peserta didik, kemampuan yang dikembangkan dan tujuan yang akan dicapai. Tingkat atau jenjang pendidikan terdiri dari pendidikan formal, informal dan non formal yang saling melengkapi. Dimana yang telah ditempuh oleh pemilik UMKM. Tingkat pendidikan dikategorikan SD, SMP sederajat, SMA sederajat, Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana. Pendidikan tersebut dilakukan dengan sistem terbuka melalui tatap muka maupun jarak jauh. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang sistem pendidikan nasional pada bab VI pasal 14 menyebutkan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

2.2.7.2 Umur Usaha

Umur usaha adalah lama seseorang pengusaha dalam mendirikan usahanya. Lama usaha tersebut berjalan dapat mempengaruhi keahlian operasional produktivitas, sehingga dapat menambah efisiensi dan mampu menekan biaya produksi lebih kecil dari hasil penjualannya. Umur usaha memberikan perubahan pola pikir perusahaan dalam kebijakan dan menjalankan operasional perusahaan. Umur usaha juga menentukan bagi kedewasaan pelaku UMKM untuk mengambil suatu keputusan atas tindak-tindakannya. Jika pelaku UMKM ingin eksistensi usahanya tetap ada, maka pelaku usaha juga harus membuat kebijakan yang dapat memperpanjang umur usahanya. Eksistensi usaha akan tetap bertahan apabila pelaku UMKM dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan usahanya dengan pasti. Semakin lama umur usahanya, maka perkembangan usahanya pun juga akan semakin baik (Adino, 2019).

Menurut (Mardiana et al., 2021) mendefinisikan bahwa semakin lama usaha yang beroperasi maka dapat mempengaruhi perkembangan pada usahanya. Karena pada umumnya usaha yang berdiri lebih lama maka akan cenderung lebih berkembang dan memiliki banyak pengalaman. Serta kemampuan usaha dalam mempertahankan usaha dalam bersaing dengan para pelaku

UMKM lainnya.

2.2.7.3 Sosialisasi SAK EMKM

Sosialisasi SAK EMKM merupakan suatu sosialisasi yang diperoleh para pelaku UMKM mengenai SAK EMKM yang merupakan usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang dapat memberikan sosialisasi tentang SAK EMKM seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan atau lembaga lainnya (Adino, 2019)

Sosialisasi SAK EMKM ialah proses suatu individu belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan tertentu dan bagaimana mengkoordinasikan perilakunya dengan perilaku orang lain dan belajar sesuai dengan peranan dan peraturan yang ditetapkan yakni SAK EMKM (Lestari, Rinny, 2022).

Menurut (Sutapa, 2020) menyatakan bahwa Sosialisasi SAK EMKM sangat mendukung pelaku UMKM memahami bagaimana cara penggunaan dan keuntungan menggunakan SAK EMKM.

2.2.7.4 Skala Usaha

Skala usaha merupakan besarnya usaha dan kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya dengan melihat jumlah tenaga kerja, tingkat penjualan dan besarnya asset yang dimiliki oleh perusahaan dalam satu periode akuntansi (Andayani et al., 2021). Seperti yang tertulis dalam UU No 20 Tahun 2008 bahwa

skala usaha dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori yaitu, mikro, kecil, dan menengah serta usaha besar. Jumlah karyawan akan menunjukkan berapa kapasitas perusahaan dalam mengoperasikan usahanya. Semakin banyak jumlah karyawan maka semakin besar tingkat kompleksitas perusahaan sehingga informasi akuntansi akan sangat dibutuhkan.

(Adino, 2019) menyatakan bahwa skala usaha merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola usahanya dengan melihat berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan dan berapa jumlah pendapatan yang didapatkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. (Julyanda, 2018) menjelaskan bahwa jumlah penjualan atau pendapatan yang diperoleh perusahaan dapat menunjukkan bahwa perputaran modal asset yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar pula tingkat kompleksitas perusahaan dalam menggunakan informasi akuntansi.

2.3 Pengaruh Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Pemahaman UMKM

Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Pelaku usaha yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, akan mempunyai tingkat kemampuan pemahaman mengenai SAK EMKM yang lebih tinggi pula. Hal ini dikarenakan pelaku usaha

tersebut akan lebih mudah memahami mengenai betapa pentingnya dilakukannya pembukuan dan juga pelaporan keuangan mengenai usaha yang sedang dijalankannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang maka akan semakin memudahkan seseorang untuk menyerap informasi atau pemahaman mengenai SAK EMKM dan menerapkannya.

Hal ini selaras dengan hasil penelitian dari (Adino, 2019), (Haryani, 2018), (Diana, 2018) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pemahaman pelaku UMKM tentang SAK EMKM. Artinya dimana bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh oleh pelaku UMKM, maka akan semakin tinggi pula pemahaman pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

H₁ : Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

2.3.2 Pengaruh Umur Usaha terhadap Pemahaman UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Umur usaha akan menentukan bagaimana cara para pelaku usaha untuk berfikir, bertindak, dan berperilaku pada perusahaan dalam melakukan operasionalnya. Selain itu, umur juga mengakibatkan perubahan pola pikir dan tingkat kedewasaan perubahan dalam mengambil sikap atas setiap tindakannya. Apabila pelaku usaha ingin eksistensi usahanya

tetap ada, maka pemilik usaha harus mengambil keputusan yang dapat memperpanjang umur usahanya. Bila mana, pembukuan yang tertata rapi sesuai dengan aturan standar serta pengelolaan yang baik dapat meningkatkan umur usaha. Semakin lama umur usaha, maka semakin baik perkembangan usahanya dan akan dibutuhkan SAK EMKM sebagai dasar pencatatan akuntansi bagi UMKM.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hasani & Nuzul, 2017) dan (Sholeh et al., 2020) menyatakan bahwa umur usaha berpengaruh positif terhadap pemahaman UMKM dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Artinya, semakin lama usaha tersebut berjalan maka akan semakin tinggi pula motivasi atau dorongan pelaku UMKM untuk melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Hal ini sejalan dengan penelitian (Priyadi, 2017) yang menyatakan bahwa umur usaha berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan berbasis SAK EMKM.

H₂ : Umur Usaha berpengaruh positif terhadap Pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

2.3.3 Pengaruh Sosialisasi SAK EMKM terhadap Pemahaman UMKM

Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Besarnya pemberian sosialisasi yang diberikan oleh IAI, Lembaga terkait maupun pihak lain yang terkait kepada pelaku UMKM akan mempengaruhi pemahaman pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM demi keberlangsungan usahanya.

Apabila tidak ada sosialisasi tentang penerapan SAK EMKM akan membuat pelaku UMKM takut untuk menggunakannya, karena keengganan pelaku usaha dalam mengambil resiko untuk mengubah tatanan keuangan yang sudah ada sedari awal. Hal ini dikarenakan informasi melalui sosialisasi yang diberikan akan memberikan pengetahuan mengenai laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Sehingga akan mempengaruhi pemahaman pelaku UMKM tersebut. Semakin sering para pelaku UMKM mendapatkan sosialisasi mengenai SAK EMKM, maka pelaku UMKM tersebut akan lebih memahami bagaimana menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dan juga memahami seberapa pentingnya melakukan pembukuan. Sehingga, melakukan pelaporan keuangan untuk usahannya.

Hasil penelitian (Adino, 2019) dan (Mardiana et al., 2021) yang memberikan hasil bahwa pemberian sosialisasi SAK EMKM berpengaruh terhadap pemahaman mengenai SAK EMKM. Artinya, pemberian sosialisasi merupakan faktor yang menentukan tingkat pemahaman atas SAK EMKM.

H₃ : Sosialisasi berpengaruh positif terhadap Pemahaman UMKM berdasarkan SAK EMKM.

2.3.4 Pengaruh Skala Usaha terhadap Pemahaman UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Akan semakin besar skala/ukuran usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM maka akan mempengaruhi pemahaman dalam menyusun

laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran usaha akan semakin besar pula kebutuhan modal usaha yang diperlukan pelaku UMKM tersebut untuk menjalankan operasional usahanya. Jika pelaku UMKM tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan modalnya itu, maka diperlukan suntikan dana dari pihak ketiga, dimana pihak tiga tersebut akan meminta bukti kelayakan usaha yang tengah dijalani dengan meminta laporan keuangan kepada pihak UMKM. Desakan kebutuhan modal inilah yang menjadi dorongan pelaku UMKM untuk berfikir dan mulai belajar memahami mengenai penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM.

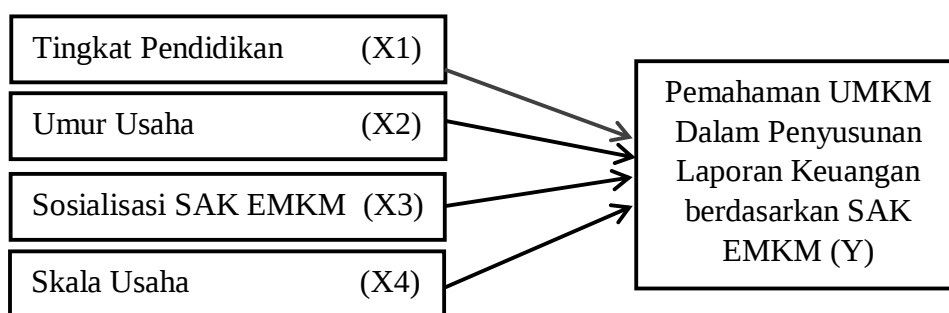
Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan (Ketut et al., 2018), (Haryani, 2018), (Wibowo et al., 2018) menyatakan bahwa ukuran usaha berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Sehingga, akan semakin besar ukuran usaha yang dimiliki pelaku UMKM maka akan semakin tinggi pula pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

H₄ : Skala Usaha berpengaruh positif terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan teori penelitian terdahulu dan landasan teori serta permasalahan telah dikemukakan, sebagai dasar untuk

merumuskan hipotesis, berikut ini digambarkan model kerangka pemikiran pengaruh antar variabel penelitian dan landasan teori serta hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini hendak mencari pengaruh antara variabel *independent* (bebas) dengan variabel *dependent* (terikat), dimana yang menjadi variabel *independent* (bebas) adalah Tingkat Pendidikan (X1), Umur Usaha (X2), Sosialisasi SAK EMKM (X3), Skala Usaha (X4), dan Pemahaman SAK EMKM (Y). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat di gambarkan dalam suatu bagan yang tersaji pada gambar 2.1 berikut ini :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Tingkat Pendidikan (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM (Y)

H2 : Umur Usaha (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman

UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM
(Y)

H3 : Sosialisasi SAK EMKM (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM (Y)

H4 : Skala Usaha (X4) berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM (Y)